

INTEGRASI NILAI PERSATUAN INDONESIA DALAM PELATIHAN KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DI SEKOLAH: PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Ishak Syairozi¹, Azmy Ali Muchtar², Siti Uswatun Hasanah³

Program Studi Pendidikan Agama Islam,

Universitas Islam Jakarta

syairozihamim@gmail.com, azmyali93@gmail.com

Abstract

Amid the challenges of globalization and digitalization that trigger cultural acculturation, there are indications of low student awareness regarding the value of unity (Bhinneka Tunggal Ika) within schools. This is reflected in national surveys showing youth polarization influenced by radicalism and social media. This study aims to analyze the integration of Indonesian unity values into democratic leadership training programs in schools from the perspective of Islamic education, while proposing an educational model aligned with Islamic principles such as *ukhuwah* (brotherhood) and *musyawarah* (deliberation). A qualitative descriptive approach was employed to provide an in-depth depiction of the phenomenon. Data collection was conducted through in-depth interviews with teachers and students participating in training at two integrated Islamic schools in Jakarta and Bekasi, participant observation, as well as literature and document studies. Data analysis adopted the Miles & Huberman model, encompassing data reduction (initial thematic coding), data display (matrices and thematic narratives), and conclusion drawing (verification through source triangulation). The expected findings indicate that integrating Indonesian unity values into democratic leadership training can effectively enhance student awareness through Islamic education, utilizing a hybrid model that combines Pancasila and the Qur'an (QS. Al-Hujurat: 13). Recommendations include the development of an inclusive national curriculum for Islamic schools to strengthen democracy based on unity.

Keywords: Indonesian unity, democratic leadership, Islamic education, school training, qualitative analysis.

Abstrak

Di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi yang memicu terjadinya akulturasi budaya, ada indikasi rendahnya kesadaran siswa terhadap nilai persatuan (Bhinneka Tunggal Ika) di lingkungan sekolah, sebagaimana tercermin dalam survei nasional yang menunjukkan polarisasi pemuda akibat pengaruh radikalisme dan media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi nilai persatuan Indonesia dalam program pelatihan kepemimpinan demokratis di sekolah dalam perspektif pendidikan Islam, serta mengusulkan model pendidikan yang selaras dengan prinsip Islam seperti *ukhuwah* (persaudaraan) dan *musyawarah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan guru dan siswa peserta pelatihan di dua sekolah Islam terpadu di Jakarta dan Bekasi, observasi partisipan, serta studi pustaka dan dokumen. Analisis data mengadopsi model Miles & Huberman, meliputi reduksi data (pengkodean tema awal), penyajian data (matriks dan narasi tematik), serta penarikan kesimpulan (verifikasi melalui triangulasi sumber). Hasil penelitian yang diharapkan menunjuk integrasi nilai persatuan Indonesia dalam pelatihan kepemimpinan demokratis dapat berhasil meningkatkan kesadaran siswa melalui pendekatan Pendidikan Islam, dengan model hybrid yang menggabungkan Pancasila dan Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 13). Rekomendasi mencakup pengembangan kurikulum nasional yang inklusif untuk sekolah Islam guna memperkuat demokrasi berbasis persatuan.

Kata Kunci: Persatuan Indonesia, kepemimpinan demokratis, pendidikan Islam, pelatihan sekolah, analisis kualitatif.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya memerlukan fondasi yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam mempersatukan keberagaman tersebut, khususnya melalui sila ketiga yaitu persatuan Indonesia (Latif, 2011). Nilai persatuan ini bukan sekadar slogan politik, melainkan merupakan prinsip fundamental yang harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Sementara, pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam era globalisasi dan digitalisasi yang membawa pengaruh akulturasi budaya serta berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Winarno menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Namun, implementasi pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai persatuan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek praktis dan kontekstual di lingkungan sekolah (Winarno, 2013). Anak-anak di sekolah merupakan anak fase kritis dalam perkembangan identitas dan karakter siswa. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kesadaran sosial, dan potensinya. Terlebih, saat sekarang mereka telah menyaksikan fenomena kehidupan dalam gadget dan hand phone yang mereka akses. Pada masa perkembangan itu Santrock menjelaskan bahwa masa remaja adalah periode penting untuk mengembangkan kompetensi sosial dan kepemimpinan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Oleh karena itu, program pelatihan kepemimpinan di sekolah bisa menjadi wahana yang efektif untuk menanamkan nilai persatuan dan demokrasi (Santrock, 2011).

Kepemimpinan demokrasi di Indonesia memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan konsep demokrasi Barat. Kepemimpinan demokrasi Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menekankan musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial (Asshiddiqie, 2010). Sementara, Pendidikan Islam memberikan perspektif spiritual dan moral yang memperkuat implementasi nilai persatuan. Konsep ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah dalam Islam mengajarkan pentingnya persaudaraan dalam konteks keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan (Shihab, 2007).

Integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam program pelatihan kepemimpinan di sekolah dapat menciptakan generasi pemimpin yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelatihan kepemimpinan di sekolah dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya persatuan dan kemampuan mereka dalam memimpin secara demokratis, seperti penelitian Zuchdi et al. (2010) menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang terencana dan sistematis dapat membentuk kepribadian siswa yang berakhlak mulia dan memiliki kesadaran kebangsaan.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pendidikan Pancasila dan pendidikan agama Islam diajarkan di sekolah, namun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari siswa, khususnya dalam konteks kepemimpinan organisasi sekolah, masih belum optimal. Organisasi siswa intra sekolah seperti OSIS, MPK, dan berbagai ekstrakurikuler sering belum menjadi wadah yang efektif untuk melatih kepemimpinan demokratis yang mengedepankan nilai persatuan. Konflik antar kelompok, eksklusivisme, dan lemahnya partisipasi siswa dalam organisasi menunjukkan perlunya program pelatihan kepemimpinan yang lebih komprehensif dan terintegrasi

dengan nilai-nilai fundamental bangsa. Di sisi lain, tantangan radikalisme dan intoleransi yang semakin menguat di kalangan generasi muda menjadi ancaman serius bagi persatuan Indonesia. Data dari berbagai survei menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya sikap intoleran di kalangan pelajar dan mahasiswa (Maarif Institute, 2017).

Hal ini menunjukkan urgensi penelitian tentang integrasi nilai persatuan Indonesia dalam pelatihan kepemimpinan demokrasi dari perspektif Pendidikan Islam. Dari sini diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghasilkan generasi pemimpin muda yang memiliki kompetensi kepemimpinan, kesadaran berbangsa, dan komitmen terhadap persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya, bagaimana integrasi nilai persatuan Indonesia dapat dilakukan dalam pelatihan kepemimpinan demokratis di sekolah dengan perspektif Pendidikan Islam?

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (Library Research). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang integrasi nilai Persatuan Indonesia dalam pelatihan kepemimpinan demokrasi di sekolah dari perspektif pendidikan Islam. Metode ini dipakai dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan; buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul tersebut. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (Content Analysis), yaitu menganalisis makna dan kandungan dari berbagai sumber literatur untuk menemukan konsep, pola, dan hubungan antar konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses analisis dilakukan

melalui tahapan identifikasi konsep kunci, kategorisasi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Miles & Huberman, menyebutnya reduksi data, sajian data (display), verifikasi melalui triangulasi sumber atau penarikan kesimpulan (Rosyada, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai Persatuan Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Studi Islam

a.1 Perspektif Pancasila

Sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia", memiliki makna filosofis yang mendalam dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, nilai persatuan Indonesia lahir dari kesadaran para pendiri bangsa akan pentingnya menyatukan berbagai elemen bangsa yang beragam dalam satu wadah negara kesatuan. Persatuan Indonesia bukan berarti penyeragaman atau penghapusan keberagaman, melainkan kesatuan dalam keberagaman (Unity in diversity) atau yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Asshiddiqie, 2010). Selanjutnya, nilai persatuan Indonesia mengandung beberapa dimensi penting. Pertama, dimensi teritorial yang menekankan kesatuan wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan yang utuh. Kedua, dimensi sosial – kultural yang mengakui dan menghargai keberagaman suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat sebagai kekayaan bangsa. Ketiga, dimensi politik yang menekankan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan yang berdaulat. Keempat, dimensi ideologis yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan (Latif, 2011).

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, nilai persatuan Indonesia diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia, mengutamakan kepentingan umum di atas

kepentingan pribadi atau golongan, serta menjaga dan memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Budimansyah, 2010). Hal senada, disebutkan pula bahwa nilai persatuan Indonesia juga mengandung prinsip-prinsip dasar yang harus diamalkan, yaitu prinsip nasionalisme yang berarti memiliki rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, prinsip solidaritas yang berarti memiliki kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi persoalan bangsa, dan prinsip integrasi yang berarti upaya menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan yang harmonis (Rosyada, 2013).

a.2 Perspektif Pendidikan Islam

Dalam perspektif Pendidikan Islam, konsep persatuan memiliki landasan yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Al-Quran dan Hadis banyak menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan umat. Konsep persatuan dalam Islam dapat dilihat dari beberapa nilai fundamental, diantaranya:

1) Ukhuwah Islamiyah yang berarti persaudaraan dalam Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa seluruh umat Islam adalah saudara tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau bangsa (Shihab, 2007). Al-Quran Surat Al-Hujrat ayat 10. Ayat ini menegaskan bahwa persaudaraan antar umat Islam merupakan ikatan yang sangat kuat yang harus dijaga.

2) Ukhuwah Wathaniyah (persaudaraan sebangsa) dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan) yang lebih luas. Islam mengajarkan bahwa persaudaraan tidak hanya terbatas pada sesama Muslim, tetapi juga meliputi seluruh manusia sebagai makhluk Tuhan (Effendy, 2011). Nabi Muhammad bersabda; "Manusia adalah keluarga Allah, dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi keluarga-Nya". Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan nilai universal tentang persatuan kemanusiaan.

3) Syura (Musyawarah) sebagai metode pengambilan keputusan bersama. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 memuji orang-orang beriman yang urusannya diputuskan

dengan musyawarah. Musyawarah dalam Islam bukan hanya sekadar mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai persatuan.

4) Tasamuh (toleransi), mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Islam mengajarkan prinsip "Lakum dinukum waliya din" (bagimu agamamu dan bagiku agamaku) yang menunjukkan pengakuan terhadap hak setiap orang untuk memeluk keyakinannya (Effendy, 2011). Toleransi dalam Islam bukan berarti mencampurkan keyakinan, melainkan sikap saling menghormati dalam perbedaan.

5) 'Adalah (keadilan) yang merupakan nilai fundamental dalam Islam. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap musuh sekalipun. Keadilan merupakan fondasi penting bagi terciptanya persatuan karena ketidakadilan akan menimbulkan perpecahan dan konflik (Shihab, 2007).

a.3 Sinergi Konseptual antara Pancasila dan Pendidikan Islam

Terdapat keselarasan dan sinergi yang kuat antara konsep persatuan dalam perspektif Pancasila dan Pendidikan Islam. Nilai persatuan Indonesia yang menghargai keberagaman sejalan dengan konsep Ukhuwah Insaniyah dan toleransi dalam Islam. Prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan yang diajarkan Islam sejalan dengan semangat demokrasi Pancasila.

Nilai keadilan dalam Islam mendukung terciptanya persatuan yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Sinergi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga tentang persatuan Indonesia, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan saling memperkuat. Bagi peserta didik Muslim, pemahaman bahwa nilai persatuan Indonesia sejalan dengan ajaran agama mereka akan memperkuat internalisasi nilai tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam memperkuat persatuan bangsa (Effendy,

2011).

B. Integrasi Nilai Persatuan Indonesia dalam Pelatihan Kepemimpinan Demokrasi di Sekolah

Peran strategis sebagai agen perubahan dalam integrasi dan mentransformasikan nilai persatuan dalam kehidupan nyata adalah sekolah. Implementasi ini harus dilakukan melalui kurikulum formal, budaya sekolah, dan yang paling utama melalui organisasi kesiswaan (Budimansyah, 2010). Untuk itu ada beberapa program yang dapat berperan dalam integrasi tersebut, diantaranya:

b.1 Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai Wadah Utama

Berdasar Permendiknas No. 39 Tahun 2008, OSIS merupakan satu-satunya organisasi kesiswaan resmi di sekolah yang berfungsi sebagai wadah untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. OSIS memegang peranan kunci dalam mengimplementasikan nilai persatuan karena strukturnya yang mencakup perwakilan dari berbagai kelas dan latar belakang siswa.

Melalui OSIS, siswa belajar berorganisasi dengan prinsip-prinsip yang selaras dengan persatuan; 1) Manajemen Konflik: Pengurus OSIS dilatih untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antar-siswa atau antar-ekstrakurikuler secara damai dan adil. 2) Kerja Sama Tim: Keberhasilan program kerja OSIS sangat bergantung pada koordinasi dan semangat persatuan antar-pengurus. 3) Partisipasi Demokratis: Pemilihan pengurus OSIS menjadi simulasi nyata bagaimana persatuan dibangun melalui proses yang menghargai hak suara setiap individu (Rosyada, 2013).

b.2 Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS)

LDKS merupakan kegiatan pelatihan fundamental bagi calon pemimpin siswa untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, disiplin, dan tanggung jawab (Zuchdi et al., 2010). Dalam LDKS, nilai persatuan diintegrasikan melalui berbagai materi dan

aktivitas, dapat pada Tabel berikut:

Tabel 1. Integrasi Nilai Persatuan

Materi/Kegiatan LDKS	Implementasi Nilai Persatuan
Teori Kepemimpinan	Menekankan sifat pemimpin yang melayani dan mempersatukan.
Materi Pancasila dan Bela Negara	Memperdalam pemahaman tentang sejarah bangsa dan kewajiban menjaga kedaulatan NKRI.
Dinamika Kelompok	Membangun kekompakan, kerja sama, dan saling percaya antar-peserta
Latihan Baris Berbaris (PBB)	Melatih kedisiplinan dan kesamaan gerak sebagai simbol persatuan dalam tindakan.

Dalam pelaksanaan LDKS di sekolah sering juga melibatkan narasumber dari kepolisian atau TNI untuk memberikan wawasan tentang bahaya narkoba dan pentingnya ketahanan nasional, yang merupakan bentuk upaya preventif dalam menjaga persatuan dari ancaman luar.

b.3 Implementasi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler menjadi sarana penting untuk mengimplementasikan nilai persatuan Indonesia. Berbagai ekstrakurikuler seperti pramuka, palang merah remaja, paskibra, kesenian, olahraga, dan lainnya dirancang untuk melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Dalam kegiatan ini, siswa belajar bekerja sama, saling menghormati, dan mengembangkan solidaritas sosial (Sumantri & Winata putra, 2017). Pelatihan kepemimpinan juga diberikan kepada para pengurus ekstrakurikuler agar mereka mampu memimpin kelompoknya secara demokratis dan inklusif. Mereka diajarkan bagaimana mengelola keberagaman anggota, memfasilitasi partisipasi semua anggota, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua orang untuk

berkembang.

b.4 Implementasi dalam Pembelajaran di Kelas

Nilai persatuan Indonesia juga diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas, khususnya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama Islam, dan mata pelajaran lainnya. Guru merancang pembelajaran yang mendorong diskusi, debat, dan musyawarah dalam memecahkan masalah atau mengambil keputusan terkait pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain diskusi kelompok, debat, simulasi, bermain peran, dan proyek kelompok. Melalui metode-metode ini, peserta didik belajar untuk menghargai pendapat orang lain, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama dalam kelompok yang beragam, dan mengambil keputusan secara demokratis.

b.5 Strategi Pembelajaran Nilai Persatuan Indonesia

Pembelajaran nilai persatuan Indonesia dalam pelatihan kepemimpinan dilakukan melalui berbagai strategi, diantaranya: 1) Pembelajaran kontekstual yang menghubungkan konsep persatuan dengan realitas keberagaman. Peserta didik diajak mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekolah, seperti perbedaan latar belakang suku, agama, status sosial ekonomi, dan kemampuan akademik, kemudian merefleksikan keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan jika disatukan (Al-Hamdani, 2014). 2) Pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) melalui simulasi dan praktik langsung. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengalami langsung peran sebagai pemimpin dalam kegiatan sekolah seperti organisasi siswa intra sekolah, kepanitiaan kegiatan, kelompok belajar, atau proyek kolaboratif. Melalui pengalaman langsung ini, peserta didik belajar bagaimana memimpin kelompok yang beragam, mengambil keputusan secara demokratis, dan mengelola perbedaan pendapat (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). 3) Pembelajaran

kolaboratif yang mendorong kerja sama antar kelompok yang beragam. Peserta didik dibentuk dalam kelompok heterogen berdasarkan latar belakang yang berbeda. Mereka diberikan tugas atau proyek yang harus diselesaikan bersama, sehingga belajar untuk saling menghargai, berkomunikasi efektif, dan mencapai tujuan bersama. 4) Pembelajaran reflektif yang mendorong peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam memimpin dan dipimpin. Refleksi ini penting untuk mengembangkan kesadaran diri dan kesadaran sosial, serta memahami makna nilai persatuan dalam konteks kepemimpinan (Santrock, 2011).

b.6 Implementasi dalam Kurikulum Merdeka (P5)

Kurikulum Merdeka membawa inovasi melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Misalkan tema “Suara Demokrasi” dalam P5 secara eksplisit mengajarkan siswa tentang proses pengambilan keputusan kolektif yang inklusif, yang merupakan esensi dari persatuan dalam demokrasi. Dalam proyek ini, siswa diajak untuk bernalar kritis dalam menghadapi perbedaan pendapat dan bekerja sama dalam tim lintas disiplin untuk menghasilkan solusi bagi masalah lingkungan sekolah.

Beberapa program pelatihan tersebut dalam prosesnya harus juga dielaborasi dengan memperhatikan pengaruh-pengaruh yang berkembang yang diakses dan diketahui oleh para peserta didik, karena akan memberi dampak sikap pada mereka. Oleh karena itu, pelatihan kepemimpinan perlu mengintegrasikan literasi digital dan kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam konteks keberagaman (Nasrullah, 2015).

C. Tinjauan Pendidikan Islam pada Pengamalan Nilai Persatuan dalam Praktik Kepemimpinan di Sekolah

c.1 Nilai Ukhuwah Islamiyah dan Wathaniyah

Konsep ukhuwah atau persaudaraan merupakan pilar utama dalam membangun persatuan menurut ajaran Islam. Dalam konteks sekolah menengah yang majemuk, ukhuwah diaplikasikan dalam beberapa tingkatan yang selaras dengan cita-cita persatuan nasional (Effendy, 2011):

a) Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Sesama Muslim): Membangun solidaritas antar-siswa Muslim untuk saling mendukung dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah.

b) Ukhuwah Wathaniyah (Persaudaraan Sebangsa): Merupakan ikatan persaudaraan berdasarkan kesamaan tanah air. Konsep ini sangat vital dalam sekolah menengah untuk menyatukan siswa dari berbagai agama dalam komitmen menjaga keutuhan NKRI.

c) Ukhuwah Basyariyah (Persaudaraan Kemanusiaan): Menghargai setiap siswa sebagai sesama makhluk Tuhan, yang mendorong sikap kasih sayang dan bantuan tanpa memandang identitas agama.

Ketiga elemen kekuatan tersebut, dalam konsep ajaran Islam menjadi perekat dalam kehidupan yang kompleks dan universal. Baik untuk kehidupan sebagai pribadi, kelompok, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan berkemanusiaan sebagai makhluk Tuhan. Dalam lingkup pembelajaran di sekolah dapat diintegrasikan dalam berbagai program pendidikan yang ada, siswa sebagai bagian dari masyarakatnya, dan kelas sebagai masyarakat kecil, lingkup sosial yang lebih besar adalah antar kelas. Sementara, organisasi yang ada di sekolah menjadi wadah praktis kepemimpinan.

c.2 Musyawarah (Syura) sebagai Esensi Demokrasi Islam

Syura adalah prinsip pengambilan keputusan dalam Islam yang didasarkan pada dialog dan pertukaran pendapat untuk mencapai kemaslahatan bersama, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an yang memerintahkan Nabi dan para pemimpin untuk selalu bermusyawarah dalam urusan duniawi (QS. Ali Imran: 159 dan QS. Asy-Syura: 38). Dalam pelatihan kepemimpinan OSIS, praktik syura

melibatkan (Yusanto & Widjajakusuma, 2002): 1) Kesetaraan Derajat: Setiap anggota rapat memiliki hak yang sama untuk berbicara dan mendengarkan pendapatnya. 2) Kebebasan Berpendapat: Peserta musyawarah diberikan ruang terbuka untuk mengekspresikan pemikiran mereka secara ilmiah dan kritis. 3) Mufakat dan Komitmen: Hasil musyawarah yang telah disepakati harus ditaati oleh semua pihak sebagai bentuk tanggung jawab kolektif.

c.3 Toleransi (Tasamuh)

Toleransi merupakan nilai penting dalam Islam yang sangat relevan dengan konteks keberagaman di Indonesia. Dalam praktik kepemimpinan di sekolah, nilai toleransi diimplementasikan melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antara peserta didik. Pemimpin siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai keberagaman agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial ekonomi yang ada di sekolah. Mereka dididik untuk tidak bersikap diskriminatif dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang perbedaan (Maarif Institute, 2017).

Toleransi dalam Islam bukan berarti mencampuradukkan keyakinan atau relativisme agama, melainkan sikap menghormati hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan keyakinannya. Dalam konteks sekolah, toleransi diwujudkan dalam bentuk penghormatan terhadap waktu ibadah siswa dari berbagai agama, pemberian ruang bagi ekspresi keberagaman budaya, penghindaran dari perundungan atau diskriminasi berbasis SARA, dan penciptaan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Kegiatan-kegiatan yang mendorong interaksi positif antarkelompok juga dirancang untuk menumbuhkan toleransi. Misalnya, kegiatan dialog antariman, kunjungan ke tempat ibadah berbeda, atau kolaborasi dalam proyek sosial yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang. Melalui interaksi langsung ini, siswa belajar memahami perspektif orang

lain dan menghargai perbedaan (Al-Hamdani, 2014).

c.4 Keadilan

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam Islam yang sangat penting dalam kepemimpinan. Al-Quran menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan bahkan terhadap diri sendiri, orang tua, dan kerabat dekat. Dalam praktik kepemimpinan di sekolah, nilai keadilan diimplementasikan melalui perlakuan yang adil terhadap semua siswa tanpa diskriminasi (Rosyada, 2013). Pemimpin siswa diajarkan untuk tidak bersikap pilih kasih atau nepotis dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Semua siswa harus diperlakukan secara adil berdasarkan prestasi, kontribusi, dan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan kedekatan personal atau kesamaan latar belakang. Keputusan-keputusan yang diambil harus objektif dan rasional, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Selain itu, keadilan harus diwujudkan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Semua siswa harus memiliki akses yang sama terhadap fasilitas sekolah, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan, dan peluang untuk mengembangkan potensi mereka. Pemimpin siswa berperan untuk memastikan tidak ada siswa yang terpinggirkan atau terabaikan. Dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan, pemimpin siswa diajarkan untuk bersikap adil dengan mendengarkan semua pihak, mempertimbangkan bukti dan argumen secara objektif, dan mengambil keputusan berdasarkan kebenaran dan keadilan.

D. Integrasi Nilai Pancasila dan Ajaran Islam dalam Membentuk Karakter Pemimpin Demokratis

Sinergi antara nilai Persatuan Indonesia dan Ajaran Islam dalam membentuk karakter pemimpin muda yang demokratis dan berjiwa persatuan dapat dilihat dari beberapa aspek dan elemen sebagai berikut:

d.1 Keselarasan Nilai Fundamental

Terdapat keselarasan yang kuat

antara nilai-nilai fundamental Pancasila dan ajaran Islam. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama Pancasila sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua sejalan dengan konsep ukhuwah insaniyah dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam Islam. Nilai persatuan dalam sila ketiga sejalan dengan konsep ukhuwah dan solidaritas dalam Islam.

Nilai kerakyatan dalam sila keempat sejalan dengan konsep musyawarah dalam Islam. Nilai keadilan sosial dalam sila kelima sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Islam. Keselarasan ini menunjukkan bahwa antara Pancasila dan Islam tidak terdapat pertentangan fundamental, bahkan saling mendukung dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Bagi siswa Muslim, pemahaman akan keselarasan ini akan memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai Pancasila sekaligus memperdalam pemahaman mereka terhadap ajaran Islam.

d.2 Keselarasan Nilai dalam Kepemimpinan

Integrasi nilai-nilai tersebut menciptakan model kepemimpinan yang holistik, di mana dimensi spiritual Islam memperkuat dimensi moral Pancasila (Al-Hamdani, 2014). Gambaran terdapat integrasi yang erat antara Ajaran Islam dan nilai Pancasila dalam perspektif pendidikan Islam dapat dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Integrasi Ajaran Islam dan Nilai Pancasila

Nilai Pancasila	Nilai Pendidikan Islam (Dirasah)	Sinergi dalam Karakter Pemimpin
Sila 1 (Ketuhanan)	Tauhid dan Amanah (Ukhuwah Islamiyah – Ramatan Lil ‘Alamin)	Integritas tinggi karena merasa diawasi Allah dalam memimpin dan berlaku kebaikan
Sila 3 (Persatuan)	Ukhuwah Wathaniyah, Basyariyah, Insaniyah	Loyalitas pada bangsa sebagai bentuk pengabdian kepada

		Tuhan.
Sila 4 (Kerakyatan)	Syura Ukhuwah Basyariyah	Keputusan yang bijaksana melalui keterlibatan kolektif.
Sila 5 (Keadilan)	Keadilan, Ukhuwah Insaniyah	Keadilan sosial bagi seluruh warga sekolah tanpa pilih kasih.

d.3 Penguatan Internalisasi Nilai

Integrasi nilai Pancasila (Persatuan Indonesia) dan ajaran Islam memperkuat internalisasi nilai pada peserta didik. Ketika siswa Muslim memahami bahwa nilai persatuan Indonesia yang mereka pelajari dalam pendidikan Pancasila sejalan dengan ajaran agama mereka tentang ukhuwah dan toleransi, mereka akan lebih mudah menerima dan mengamalkan nilai tersebut, serta menjadi bagian integral dari identitas keagamaan mereka. Dengan demikian, memberikan pemahaman siswa yang lebih komprehensif dan mendalam tentang nilai-nilai tersebut. Mereka dapat memahami nilai persatuan dari perspektif ideologi negara dan juga dari perspektif spiritual mereka. Pemahaman yang multi-dimensi ini akan membentuk keyakinan yang lebih kuat tentang pentingnya nilai persatuan.

d.4 Pembentukan Identitas yang Seimbang

Integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam membantu siswa Muslim membentuk identitas yang seimbang antara identitas keagamaan dan identitas kebangsaan. Mereka memahami bahwa menjadi Muslim yang baik tidak bertentangan dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Keduanya justru saling memperkuat karena ajaran Islam mendorong umatnya untuk menjadi warga negara yang baik, menaati peraturan yang adil, berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan menjaga perdamaian. Identitas yang seimbang ini penting untuk mencegah radikalisme dan ekstremisme yang sering muncul dari pemahaman yang parsial atau dikotomis antara agama dan kebangsaan sehingga akan dapat menepis konflik internal.

d.5 Pengembangan Karakter Kepemimpinan yang Holistik

Sinergi antara nilai Pancasila dan

ajaran Islam menghasilkan model kepemimpinan yang holistik, yang menggabungkan kompetensi teknis dengan integritas moral dan spiritual. Pemimpin muda yang terbentuk melalui pendekatan ini tidak hanya memiliki keterampilan memimpin secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan ajaran Islam. Karakter kepemimpinan yang terbentuk meliputi integritas yang tinggi berdasarkan nilai amanah dalam Islam dan kejujuran dalam Pancasila, kepedulian sosial yang didasari oleh nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan konsep Rahmatan lil alamin dalam Islam, kemampuan bermusyawarah yang sejalan dengan prinsip demokrasi Pancasila dan ajaran Syura dalam Islam, sikap toleran dan menghargai keberagaman berdasarkan nilai persatuan Indonesia dan konsep Tasamuh dalam Islam, serta komitmen terhadap keadilan sosial yang merupakan nilai bersama antara Pancasila dan Islam.

d.6 Kontekstualisasi Nilai Universal

Integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam juga mengajarkan siswa untuk mengontekstualisasikan nilai-nilai universal dalam konteks lokal Indonesia. Nilai-nilai universal seperti keadilan, persaudaraan, toleransi, dan demokrasi yang diajarkan dalam Islam dikontekstualisasikan dalam bentuk nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan realitas sosial budaya Indonesia. Kemampuan mengontekstualisasikan nilai universal ini penting agar siswa tidak terjerumus dalam pemahaman yang kaku atau tekstual yang dapat menimbulkan konflik dengan nilai-nilai kebangsaan. Sebaliknya, mereka mampu memahami bahwa nilai-nilai universal Islam dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan konteks lokal, termasuk dalam bentuk nilai-nilai Pancasila.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Nilai Persatuan Indonesia

f.1 Faktor Pendukung

Beberapa faktor yang mendukung

implementasi nilai Persatuan Indonesia melalui pelatihan kepemimpinan demokrasi di sekolah sebagai berikut, yaitu: 1) Kebijakan pemerintah, ini diwujudkan dalam kurikulum Pendidikan Nasional yang mengarahkan implementasi pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai mata pelajaran. 2) Komitmen sekolah dan pendidik, hal ini setiap guru bersepakat bahwa pendidikan yang dilakukan dalam rangka pembentukan karakter siswa, sehingga sekolah mengembangkan berbagai program pembentukan karakter siswa. 3) Keberadaan organisasi siswa dan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan tersebut menjadi tempat praktik kepemimpinan, seperti OSIS, MPK, dan berbagai ekstrakurikuler. 4) Keberagaman siswa di sekolah, semua itu menjadi laboratorium alamiah untuk belajar tentang persatuan dalam perbedaan yang terjadi pada interaksi mereka. 5) Dukungan orang tua dan masyarakat terhadap pendidikan karakter. 6) Keselarasan antara nilai Pancasila dan ajaran Islam, hal ini memudahkan internalisasi nilai pada siswa dan legitimasi nilai persatuan di mata siswa.

f.2 Faktor Penghambat

Selanjutnya, beberapa faktor penghambat implementasi nilai Persatuan Indonesia dalam pelatihan kepemimpinan demokrasi di sekolah, diantaranya: 1) Pemahaman yang masih terbatas tentang nilai Pancasila, ini terjadi di kalangan siswa dan bahkan sebagian pendidik, karena pembelajaran Pancasila bersifat kognitif dan hafalan. 2) Orientasi pendidikan yang masih sangat akademis, berorientasi pada nilai ujian, sehingga pendidikan karakter kepemimpinan sering terabaikan atau tidak prioritas. 3) Terbatasnya waktu dan sumber daya, untuk program pelatihan kepemimpinan yang komprehensif. 4) Inkonsistensi antara nilai yang diajarkan dengan praktik di sekolah atau masyarakat. 5) Pengaruh negatif dari media sosial dan lingkungan yang dapat mengikis nilai persatuan. 6) Pemahaman yang keliru tentang agama yang cenderung eksklusif atau intoleran. 7) Praktik politik identitas

agama, suku, kelompok yang mempengaruhi suasana di sekolah. 8) Kurangnya keteladanan dari para pemimpin di berbagai tingkatan.

Kedua hal tersebut, masing-masing harus menjadi perhatian lembaga pendidikan dan semua stakeholder sekolah dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan karakter siswa yang memiliki integritas persatuan Indonesia sebagai generasi calon pemimpin masa depan.

f.3 Strategi Mengatasi Faktor Penghambat

Untuk mengatasi berbagai faktor tersebut dan mewujudkan tujuan membentuk karakter yang berintegritas persatuan, beberapa langkah strategi dapat dilakukan, yaitu: 1) Penguatan kompetensi pendidik dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila. 2) Pembelajaran tentang nilai Pancasila kontekstual, aktif, dan bermakna, tidak sekadar kognitif dan hafalan. 3) Sekolah perlu sumber daya dan waktu yang memadai untuk program pendidikan karakter. 4) Konsistensi pengajaran nilai dengan praktik kehidupan. 5) Perlu literasi media yang kuat untuk membekali siswa dalam mengonsumsi informasi. 6) Ada dialog dan kerjasama antara sekolah dengan tokoh agama dan masyarakat. 7) Upaya sistematis untuk menghadirkan tokoh yang dapat menjadi teladan bagi siswa dalam mengamalkan nilai persatuan.

Strategi tersebut dapat dikemas lembaga pendidikan menjadi suatu program kokurikuler atau lainnya – bekerjasama dengan stakeholder yang ada untuk menumbuhkan karakter persatuan sejak dini mulai dari lingkungan sekolah dengan integrasi nilai Pancasila dan ajaran agama guna memperkuat legitimasi siswa dalam membentuk integritas dirinya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa nilai persatuan Indonesia dalam perspektif Pancasila mengandung makna kesatuan dalam keberagaman yang mencakup dimensi teritorial, sosial-kultural, politik, dan ideologis, dan dalam perspektif Pendidikan Islam konsep persatuan

dilandasi oleh nilai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniyah, dan ukhuwah Insaniyah/Basyariyah. Kedua konsep nilai tersebut memiliki koherensi dalam mendorong persatuan, toleransi, dan keadilan.

Dalam pelatihan kepemimpinan demokrasi di sekolah, integrasi nilai-nilai persatuan dilakukan dalam berbagai program pendidikan dan pengajaran, yaitu melalui pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan pembelajaran reflektif, serta melalui kegiatan organisasi intra sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler.

Pendidikan Islam memberikan landasan yang kuat bagi pengamalan nilai-nilai dalam praktik kepemimpinan di sekolah, seperti nilai ukhuwah Islamiyah mendorong persaudaraan dan solidaritas. Musyawarah koheren dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan partisipatif, nilai toleransi (tasamuh) mendorong sikap saling menghormati perbedaan, dan nilai keadilan memastikan perlakuan adil tanpa diskriminasi. Kemudian integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam dengan koherensi nilai fundamental dari kedua perspektifnya dapat membentuk karakter pemimpin muda yang demokratis dan berjiwa persatuan yang memiliki integritas dan komitmen.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Al-Hamdani, M. (2014). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Islam pada Siswa Sekolah Menengah. Jakarta: Rajawali Press.

[2] Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

[3] Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.

[4] Covey, S. R. (2004). The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change. New York: Free Press.

[5] Effendy, B. (2011). Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik

Islam di Indonesia. Jakarta: Democracy Project.

[6] Kirkpatrick, D. L., & Kirkpatrick, J. D. (2006). Evaluating Training Programs: The Four Levels (3rd ed.). San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

[7] Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[8] Maarif Institute. (2017). Laporan Survei Toleransi dan Radikalisme di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa. Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity.

[9] Mahfud MD, M. (2014). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

[10] Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

[11] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.

[12] Rosyada, D. (2013). Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.

[13] Rosyada, D. (2020), Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan, Kencana Prenada Media Group

[14] Santrock, J. W. (2011). Life-Span Development (13th ed.). New York: McGraw-Hill.

[15] Shihab, M. Q. (2007). Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan.

[16] Sumantri, E., & Winataputra, U. S. (2017). Diseminasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Penerbit UPI.

[17] Winarno. (2013). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara.

[18] Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2002). Pengantar Manajemen Syariat. Jakarta: Khairul Bayan.

[19] Zuchdi, D., Prasetya, Z. K., & Masruri, M. S. (2010). Pengembangan Model Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Pembelajaran Bidang Studi di Sekolah Dasar. Yogyakarta: UNY Press.